E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 330-344
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2026

Analisis Pelaksanaan E-Katalog Versi 6 Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Terhadap Umkm Di Kota Payakumbuh

Tomi Asra[1], Yimmi Syavardie[2]
[1,2] Program Studi Manajemen, Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
e-mail: tomiasra@gmail.com, yimmisyavardie678@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meng Analisis Pelaksanaan E-Katalog Versi 6 Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terhadap UMKM di Kota Payakumbuh. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 orang sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan model skala likert kemudian diuji ke validan dan kehandalan dari kuesioner tersebut. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode Regresi Linear Berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua data valid dan reliabel sehingga dapat dilanjutkan penelitian karena data yang digunakan valid dan reliabel. Hasil dari penelitian ini adalah a). Kompetensi SDM (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah. b). Infrastruktur Teknologi Informasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah. c). Regulasi/Kebijakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah. d). Penerimaan Teknologi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah. e). Kompetensi SDM, Infrastruktur Teknologi Informasi,

Regulasi/Kebijakan dan Penerapan Teknologi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah.

Kata kunci: *Kompetensi SDM (X1) Infrastruktur TI (X2)Regulasi/Kebijakan (X3) Penerimaan Teknologi (X4) dan Pelaksanaan E-Katalog V6 (Y).*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of E-Catalog Version 6 in government goods and services procurement regarding MSMEs in Payakumbuh City. The study population consisted of 30 individuals, all of whom also served as the research sample. Data were collected via Likert-scale questionnaires, the validity and reliability of which were subsequently tested. The data analysis technique employed was Multiple Linear Regression. Research results indicated that all data were valid and reliable, allowing the study to proceed. The findings are as follows: a) Human Resource Competence (X1) has a positive and significant effect on the implementation of E-Catalog V6 among MSMEs in Payakumbuh City (whether currently registered or with the potential to join the local E-Catalog) and among procurement staff at the UKPBJ (Procurement Service Unit) and Regional Government Agencies; b) Information Technology Infrastructure (X2) has a positive and significant effect on the implementation of E-Catalog V6 among MSMEs in Payakumbuh City (whether currently registered or with the potential to join the local E-Catalog) and among procurement staff at the UKPBJ and Regional Government Agencies; c) Regulations/Policies (X3) have a positive and significant effect on the implementation of E-Catalog V6 among MSMEs in Payakumbuh City (whether currently registered or with the potential to join the local E-Catalog) and among procurement staff at the UKPBJ and Regional Government Agencies; d) ... Technology Acceptance (X4) has a positive and significant influence on the implementation of the V6 e-catalog among MSMEs in Payakumbuh City—whether currently registered or with the potential to join the local e-catalog—as well as among procurement staff at the UKPBJ and regional government agencies. e). Human Resource Competence, Information Technology Infrastructure,

Regulations/Policies, and Technology Acceptance simultaneously exert a positive and significant influence on the implementation of the V6 e-catalog among MSMEs in Payakumbuh City—whether currently registered or with the potential to join the local e-catalog—as well as among procurement staff at the UKPBJ and regional government agencies.

Keywords: *Human Resource Competence (X1), IT Infrastructure (X2), Regulations/Policies (X3), Technology Acceptance (X4), and V6 E-Catalog Implementation (Y).*

LATAR BELAKANG

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (PBJP) memegang peranan yang sangat krusial sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan PBJP tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Saat ini, PBJP tidak lagi dipandang sebagai sekadar proses administratif, melainkan sebagai bagian penting dari transformasi birokrasi dan pembangunan ekonomi nasional. Pengadaan yang baik diyakini mampu meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong partisipasi UMKM, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Akan tetapi, PBJP masih menjadi salah satu titik rawan terjadinya praktik korupsi, kolusi, maupun penyalahgunaan wewenang. Isu seperti mark-up harga, pengaturan pemenang tender, lemahnya pengawasan, hingga minimnya keterbukaan informasi masih menjadi persoalan serius yang perlu dibenahi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mendorong reformasi sistem pengadaan melalui digitalisasi. Salah satu terobosan strategis yang dikembangkan adalah penerapan Katalog Elektronik (e-Katalog). Sistem ini menyediakan informasi lengkap mengenai

barang/jasa, spesifikasi teknis, harga, dan penyedia yang telah diverifikasi, sehingga proses pengadaan dapat dilakukan secara daring, lebih cepat, dan lebih transparan tanpa melalui prosedur tender yang rumit.

Keunggulan e-Katalog tidak hanya pada efisiensi proses pengadaan, tetapi juga akuntabilitas dan efektivitas anggaran. Pemerintah dapat membandingkan harga antar penyedia secara langsung, sehingga potensi pemborosan anggaran dapat diminimalisir. Selain itu, sistem ini mendukung keterlibatan UMKM local selaras dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha kecil yang menjadi pilar ekonomi nasional.

Dalam konteks transformasi digital dan era pemerintahan terbuka (*open government*), e-Katalog menjadi instrumen penting dalam mendorong keterbukaan informasi dan memperkuat pengawasan publik. Masyarakat serta pemangku kepentingan dapat mengakses data pengadaan secara real time, sehingga potensi praktik kolusi dan penyimpangan dapat lebih cepat terdeteksi.

Namun demikian, keberhasilan implementasi e-Katalog sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM pengelola, infrastruktur digital, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, dan penguatan infrastruktur teknologi menjadi kunci keberlanjutan sistem pengadaan digital.

Pada tahun 2023, LKPP merilis e-Katalog Versi 6 (V6) sebagai bentuk transformasi digital PBJP yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Versi terbaru ini menghadirkan perbaikan signifikan pada antarmuka pengguna, kecepatan pencarian produk, integrasi dengan sistem perencanaan (SIRUP), serta keterhubungan dengan sistem keuangan daerah (SIMDA). Peluncuran ini diperkuat oleh Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Katalog Elektronik yang mengatur pengelolaan katalog nasional, sektoral, dan lokal.

Salah satu pengaturan yang menjadi sorotan utama dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah kewajiban bagi pemerintah untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 40% dari total anggaran pengadaan kepada produk dan/atau jasa yang disediakan oleh Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam negeri. Ketentuan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk masuk ke pasar pengadaan pemerintah yang sebelumnya relatif terbatas aksesnya. Di sisi lain, kebijakan tersebut menuntut instansi pemerintah agar secara aktif mengutamakan penyedia berskala kecil dalam setiap tahapan pengadaan. Tulisan ini bertujuan membahas substansi pengaturan tersebut, alasan pembentukannya, dampak yang ditimbulkan bagi para pemangku kepentingan, serta strategi pemanfaatannya secara efektif.

Penetapan kewajiban alokasi anggaran tersebut didorong oleh sejumlah tujuan strategis yakni :

1. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan menyalurkan belanja pemerintah kepada pelaku UMKM di berbagai wilayah. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan skala usaha, tetapi juga pada terbukanya kesempatan kerja baru serta berkurangnya ketimpangan akibat urbanisasi.
2. Keterlibatan UMKM yang lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah turut memperkokoh rantai pasok dalam negeri. Hal ini berkontribusi pada peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan memperkuat fondasi kemandirian ekonomi nasional.
3. Berkembangnya UMKM memastikan bahwa nilai tambah ekonomi baik yang berasal dari penggunaan tenaga kerja lokal maupun pemanfaatan bahan baku domestic tetap berputar di dalam negeri.
4. Kebijakan ini mendorong terbangunnya sistem pengadaan yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana pelaku usaha kecil memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, sehingga pasar pengadaan pemerintah tidak lagi didominasi oleh perusahaan berskala besar semata.

Dalam praktiknya, penerapan kebijakan alokasi pengadaan bagi UMKM masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kesiapan pelaku UMKM itu sendiri. Sebagian besar UMKM belum sepenuhnya memahami mekanisme pengadaan berbasis digital, seperti penggunaan platform e-Katalog, penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), maupun pemenuhan standar

mutu yang dipersyaratkan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI). Kondisi ini berpotensi menghambat daya saing UMKM, meskipun secara regulatif telah disediakan porsi anggaran khusus.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di sejumlah wilayah, khususnya daerah terpencil dan perdesaan, turut menjadi hambatan signifikan. Akses internet yang tidak stabil serta minimnya kepemilikan perangkat pendukung menyebabkan pelaku UMKM kesulitan untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam sistem e-Purchasing.

Tantangan lainnya berkaitan dengan strategi pemaketan pengadaan oleh instansi pemerintah. Pembagian paket harus dilakukan secara proporsional agar nilai kontrak sesuai dengan kapasitas produksi UMKM. Paket yang terlalu besar berisiko tidak dapat dipenuhi oleh UMKM, sementara paket yang terlalu kecil dapat menyulitkan pencapaian target alokasi anggaran sebesar 40 persen.

Di sisi pengawasan, diperlukan mekanisme monitoring dan verifikasi yang kuat untuk menjamin keakuratan data realisasi kebijakan. Pemerintah harus mencegah praktik penyalahgunaan, seperti penggunaan penyedia yang secara administratif diklaim sebagai UMKM namun tidak memenuhi kriteria, serta potensi manipulasi pelaporan guna memenuhi target alokasi secara semu.

Implementasi kebijakan alokasi minimal 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMKM diproyeksikan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Dari perspektif ekonomi wilayah, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan peran UMKM sebagai penerima belanja negara. Penyaluran dana publik kepada pelaku usaha skala kecil tidak hanya memperkuat keberlanjutan usaha, tetapi juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta memperluas daya beli masyarakat di tingkat daerah. Selain itu, keberadaan produk unggulan desa, seperti kerajinan tradisional, produk olahan pertanian, maupun industri kreatif berbasis lokal, memiliki peluang lebih besar untuk terintegrasi ke dalam sistem e-Katalog, sehingga jangkauan pemasarannya melampaui pasar konvensional.

Dari sisi struktur industri, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap penguatan kemandirian rantai pasok domestik. Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mendorong pelaku industri dan distributor nasional untuk membangun kemitraan strategis dengan UMKM sebagai pemasok pendukung. Pola kemitraan ini memperkokoh jaringan produksi dalam negeri, yang pada akhirnya berimplikasi pada penurunan ketergantungan terhadap impor serta peningkatan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah.

Manfaat lainnya tercermin pada peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM. Adanya preferensi kebijakan dalam pengadaan pemerintah menjadi insentif bagi UMKM untuk melakukan perbaikan mutu, baik melalui pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Proses standardisasi ini berperan penting dalam meningkatkan kapabilitas UMKM agar mampu bersaing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di tingkat regional.

Lebih lanjut, kebijakan alokasi 40 persen turut berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pelaku usaha mikro di daerah tertinggal dan terpencil memperoleh peluang yang lebih setara untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, sehingga manfaat belanja negara tidak terkonsentrasi di wilayah maju saja. Dengan dukungan transformasi digital serta strategi pemaketan pengadaan yang adaptif terhadap kapasitas UMKM, perputaran ekonomi diharapkan berlangsung lebih merata di berbagai daerah.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang cukup progresif dalam mendorong reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik. Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mulai mengimplementasikan e-Katalog Versi 6 (V6)dalam upaya modernisasi pengadaan barang/jasa. Meskipun membawa banyak keunggulan, implementasi e-Katalog Versi 6 (V6) di daerah tidak terlepas dari berbagai kendala.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan beberapa isu faktual yang muncul dalam implementasi di Kota Payakumbuh Berikut uraian masalah yang telah dipertajam, diperjelas indikatornya, dan dilengkapi data komparatif agar argumentasi penelitian lebih

kuat, seperti berikut :

1. Kompetensi SDM masih terbatas (isu paling dominan)

Meskipun Kota Payakumbuh memiliki UKPBJ yang sudah berfungsi penuh, namun kesiapan SDM dalam mengoperasikan fitur-fitur e-Katalog Versi 6 (V6)masih rendah, ditunjukkan oleh:

Akar Permasalahan:

➢Sumber daya manusia bagi pegguna terutama bagi UMKM belum maksimal sehingga tidak semua proses pengadaan dapat ditangani tenaga yang kompeten.

➢Penguasaanterhadap fitur baru e-Katalog Versi 6 (V6)(negosiasi elektronik, manajemen keranjang belanja, evaluasi penyedia, dashboard analitik) oleh UMKM masih minim.

➢Pelatihan yang diberikan belum merata, hanya mengirim satu atau dua perwakilansehingga transfer knowledge tidakberjalan.

Dampak:

- Penggunaan sistem menjadi tidak optimal.
- Kesalahan input spesifikasi dan pemilihan produk sering terjadi.
- Waktu penyelesaian transaksi lebih lama dibanding standar.

Kesimpulan:

Kapasitas SDM menjadi hambatan paling signifikan dalam memaksimalkan fungsi e-Katalog v6.

1. Rendahnya persentase transaksi melalui katalog lokal (UMKM lokal)

Walaupun Payakumbuh memiliki banyak UMKM potensial, tingkat partisipasi mereka di katalog lokal masih rendah.

Akar Permasalahan:

- UMKM belum memahami persyaratan masuk e-Katalog (NIB, sertifikat halal, brosur digital, spesifikasi teknis).
- Harga UMKM tidak kalah kompetitif, tetapi administrasi digital menjadi hambatan utama.
- Pendampingan oleh pemerintah daerah belum intensif dan tidak terjadwal.

Dampak:

- Target Daerah sejak Tahun 2023 s/d 2025 minimal 40% belanja daerah untuk UMKM tidak tercapai (Sumber https://data-pdn.inaproc.id/, 2026) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

Tabel 1. Data Analisa Perencanaan Penyedia Pemerintah Kota Payakumbuh 2026

No.	Tahun	UMKM Mikro	UMKM Kecil	UMKM Menengah	Pelaksanaan Pengadaan Barang	e-Purchasing
1	2023	16.17 Rb	1.77 Rb	51	11,83 %	11, 36 %
2	2024	14.76 Rb	1.53 Rb	38	9,43 %	9,03 %
3	2025	52	39	25	9,84 %	9,70 %

Sumber : Data olahan pdn.inaproc.id

- Peluang peningkatan ekonomi lokal tidak optimal.
- OPD cenderung membeli produk dari luar daerah karena lebih lengkap.

Kesimpulan:

Dari tabel 1. Rendahnya partisipasi UMKM lokal menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan e-Katalog yang pro-UMKMdenganpersentasepelaksanaan dan e-Purchasingdibawah 40 %, tidaksesuaidengan target Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah kewajiban bagi pemerintah untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 40% dari total anggaran pengadaan kepada produk dan/atau jasa yang disediakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam negeri.

Dalam hal ini penulis akan melakukan kajian terhadap implementasi pemamfaatan e-Katalog Versi 6 (V6) berkaitan dengan tingkat pelaksanaannya serta pemahaman pengguna khususnya bagi UMKM Kota Payakumbuh yang diberi judul

''Analisis Pelaksanaan E-Katalog Versi 6 (V6) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Terhadap UMKM Di Kota Payakumbuh''

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur Teknologi Informasi, Regulasi/Kebijakan, dan Penerimaan Teknologi terhadap pelaksanaan e-Katalog Versi 6 (V6) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Payakumbuh. Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Payakumbuh pada Februari–Agustus 2026 dengan populasi yang meliputi pelaku UMKM yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog lokal serta pegawai pengadaan pada UKPBJ dan perangkat daerah. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam penggunaan e-Katalog V6, dengan jumlah 30 responden. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, regulasi, dan literatur yang relevan. Instrumen menggunakan skala Likert lima tingkat.

Variabel penelitian terdiri atas Kompetensi SDM (X1), Infrastruktur Teknologi Informasi (X2), Regulasi/Kebijakan (X3), Penerimaan Teknologi (X4), dan Pelaksanaan e-Katalog V6 (Y). Penerimaan teknologi diukur berdasarkan *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989; Venkatesh & Davis, 2000). Analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Uji validitas menggunakan korelasi *Product Moment*, reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan kriteria >0,60, sedangkan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji *t*, uji *F*, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui pengaruh parsial, simultan, serta kontribusi variabel independen terhadap pelaksanaan e-Katalog V6 (Ghozali, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan pengujian terhadap data yang ada dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji validitas data dan reliabilitas, dari hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki data yang valid

dan handal. Begitu juga dengan uji deskriptif responden menunjukkan bahwa rata –rata jawaban responden dalam penelitian ini masuk dalam kategori cukup baik dari seluruh variabel yang penulis teliti meskipun dilihat per item pernyataan ada juga yang masuk dalam kategori baik dan sangat baik tetapi secara rata-rata masuk dalam kategori cukup baik.

Uji asumsi klasik yang ada dalam penelitian ini sebagai syarat dalam uji Regresi Linear Berganda yang terdiri dari uji normalitas dari hasil temuan menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang normal, begitu juga dengan uji Multikolinearitas dalam penelitian ini tidak terjadi kasus multikolinearitas dan hetersokedastisitas sehingga syarat untuk uji regresi ini sudah memenuhi.

Untuk uji Regresi linear berganda dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel variasi kompetensi SDM memiliki pengaruh yang positif terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah, artinya apabila kompetensi SDM ditingkatkan maka penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif semakin baik kompeensi SDM yang ada maka akan semakin meningkat penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama di atas, ditemukan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah, hal ini terlihat dari uji hipotesis yang di lakukan bahwa nilai signifikansi dari uji t dibawah dari tingkat signifikan yang ditetapkan sehingga hipotesa yang di ajukan dapat diterima.

Kemudian variabel kedua yang penulis teliti adalah infrastruktur tekonologi informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM

di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah artinya apabila infrastruktur tekonologi informasi ini ditingkatkan terus maka penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Kemudian hipotesi kedua infrastruktur tekonologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikan dibawah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sehingga hipotesis yang di ajukan dapat diterima.

Kemudian variabel ketiga yang penulis teliti adalah regulasi/kebijakan memiliki pengaruh yang positif terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah artinya apabila regulasi/kebijakan ini ditingkatkan terus maka penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Kemudian hipotesi ketiga regulasi/kebijakan berpengaruh signifikan terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikan dibawah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sehingga hipotesis yang di ajukan dapat diterima.

Kemudian variabel keempat yang penulis teliti adalah penerimaan tekonologi memiliki pengaruh yang positif terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah artinya apabila penerimaan tekonologi ini ditingkatkan terus maka penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota

Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Kemudian hipotesis keempat penerimaan tekonologi berpengaruh signifikan terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikan dibawah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sehingga hipotesis yang di ajukan dapat diterima.

Kemudian hipotesis ke lima dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM, infrastruktur teknologi informasi, regulasi/kebijakan dan penerimaan teknologi secara bersama - sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah karena nilai signifikan yang lebih kecil dari tingkat alpha yang ditetapkan sehingga hipotesa yang di ajukan dalam penelitian ini secara bersama- sama dapat diterima.

Dari hasil uji koefisien determinan yang diperoleh dapat dilihat bahwa variabel kompetensi SDM, infrastruktur teknologi informasi, regulasi/kebijakan dan penerimaan teknologi memberikan kontribusi yang besar terhadap penerapan e-katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar atau berpotensi tergabung dalam e-Katalog local, dan juga para Pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian yang penulis lakukan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-Katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh yang terdaftar maupun berpotensi tergabung dalam e-Katalog lokal serta pada pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah, yang menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia, semakin optimal pula penerapan e-Katalog V6; infrastruktur teknologi informasi juga berpengaruh positif

dan signifikan terhadap penerapan e-Katalog V6, sehingga ketersediaan dan kesiapan infrastruktur teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses penerapan sistem; regulasi atau kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-Katalog V6, yang menunjukkan bahwa kejelasan dan dukungan kebijakan dapat mendorong pelaksanaan e-Katalog V6 secara lebih efektif; penerimaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-Katalog V6, sehingga semakin baik penerimaan dan kesiapan pengguna dalam memanfaatkan teknologi, semakin baik pula penerapannya; serta secara simultan kompetensi SDM, infrastruktur teknologi informasi, regulasi/kebijakan, dan penerimaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-Katalog V6 pada UMKM di Kota Payakumbuh serta pegawai pengadaan di UKPBJ dan Perangkat Daerah, sehingga keempat faktor tersebut perlu diperhatikan secara bersama-sama untuk mendukung optimalisasi penerapan e-Katalog V6.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi. (*2019*). "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arrowsmith, S. 2010. Public Procurement Regulation: An Introduction, http://www.nottingham.ac.uk

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy: A framework of analysis. Boston: Little, Brown and Company.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Grindle, M. S. (1980). Policy implementation in developing countries. Princeton University Press.

Ghozali, I., & Latan, H. (2024). Kuadrat terkecil parsial: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan WarpPLS 5.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (Jurnal/Buku)

LKPP. (2023). Pedoman penggunaan e-Katalog versi 6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. https://www.lkpp.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem e-Katalog. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Prasetyo, A., & Nugroho, Y. (2021). Analisis penerapan e-Katalog dalam pengadaan barang pemerintah di Kabupaten Sleman. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 112–123. https://doi.org/10.20473/jap.v9i2.112

Rahman, F., & Putri, L. (2020). Analisis efektivitas implementasi e-Katalog di instansi pemerintah: Studi kasus Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(1), 30–41.

Sugiyono, (2025). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Models for superior performance. New York: John Wiley & Sons.

Sari, D. P., & Hidayat, R. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi adopsi e-Katalog pada UMKM di Kota Bandung. Jurnal Sistem Informasi, 18(1), 45–57. https://doi.org/10.32678/jsi.v18i1.45

Zwass, V. (2010). Foundations of information systems. Boston: Cengage Learning.